Analisis Implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi Negeri Di Kabupaten Karanganyar

# ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE *REWARD* POLICY FOR ENTERING HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN INCREASING PARTICIPATION OF STATE HIGHER EDUCATION IN KARANGANYAR DISTRICT

**dina tri susilowati universitas negeri yogyakarta** **dinatri.2018@student.uny.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi Kebijakan

*Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN menurut Edward III sebagai berikut : a) komunikasi berjalan dengan efektif, b) segi sumber daya kurang efektif karena mengalami hambatan pada sumber daya manusia dan sumber dana, c) sikap berjalan baik, d)struktur birokrasi efektif. Faktor pendorong dalam meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi negeri berikut dari segi impelementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN ialah berdampak positif terhadap meningkatnya motivasi belajar anak. Sedangkan faktor penghambat nya yaitu dari segi impelementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN yaitu terbatasnya dana, sikap tidak konsisten para pelaksana kebijakan, belum adanya pengukuran yang jelas mengenai ketercapaian tujuan kebijakan.

Kata kunci : kebijakan pendidikan, pendidikan tinggi, angka partisipasi pendidikan.

***Abstract***

*This study aims to determine and analyze the process of implementing the PTN Entrance Reward Policy in increasing public higher education participation in Karanganyar Regency. This study used qualitative research methods. The results of the analysis of the implementation of the PTN Entrance Reward Policy according to Edward III are as follows: a) communication runs effectively, b) in terms of resources is less effective because of obstacles in human resources and funding sources, c) attitude goes well, d) effective bureaucratic structure. The driving factor in increasing participation in state higher education and in terms of the implementation of the PTN Entrance Reward Policy is that it has a positive impact on increasing children's learning motivation. While the inhibiting factors are in terms of the implementation of the PTN Entrance Reward Policy, namely limited funds, inconsistent attitudes of policy implementers, there is no clear measurement of the achievement of policy objectives.*

*Keywords: educational policy, higher education, enrollment rates*

# PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003, pendidikan formal di dalam implementasinya pendidikan terbagi menjadi beberapa jenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan

jenjang menengah maupun pendidikan tinggi.

Menurut Muhardi, M. (2004:479) pendidikan tinggi merupakan indikasi dari kemajuan pendidikan suatu negara di mana pendidikan tinggi diharapkan mampu

memberikan sumbangsih manusia yang berkualitas dalam pengetahuan penguasaan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pemerintah daerah yang aktif meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan tinggi (Indah

S. W., 2022). Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi dengan memberikan *Reward* bagi siswa yang bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dan diterima di pendidikan tinggi negeri. Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah satu wilayah yang peduli akan pembangunan sumber daya manusia di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghadirkan kebijakan ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat nya untuk menempuh pendidikan tinggi yang diberikan nama Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

Kebijakan *Reward* Masuk PTN merupakan salah satu bentuk cara apresiasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap putra-putri daerahnya yang bisa diterima di pendidikan tinggi negeri . Kebijakan *Reward* Masuk PTN merupakan kebijakan rutin yang dilakukan dari tahun 2017 hingga saat ini dengan memberikan sejumlah uang sesuai jenjang yang di tempuh

oleh calon penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN (Indah S. W., 2022). Kebijakan *Reward* Masuk PTN bukan hanya untuk memberikan motivasi kepada para siswa akan tetapi juga dalam meningkatkan partispasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi sehingga bisa berdampak positif terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (2019) dapat dilihat jika partisipasi jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) menggambarkan bagimana tingkat partisipasi warganya dalam menempuh jenjang pendidikan pendidikan tinggi secara keseluruhan sehinggga seringkali di berbagai negara maju maupun berkembang sering menghubungkan antara Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) dengan tingkat kemajuan proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi di negara tersebut. Menurut data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) terus mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Data pencapaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) tahun 2015-2019 menurut Kemenristekdikti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pencap aian | 25,26% | 27,98% | 29,93% | 30,19% | 30,28% |

Sumber : Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) masih berada di bawah target Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada jenjang tahun 2015 – 2019 pada setiap tahunnya terdapat selisih 1-1,5% (satu sampai satu koma lima persen). Walaupun Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi

Data di atas jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2019 yaitu sebesar 32,55% (tiga puluh dua koma lima puluh lima persen) maka capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Secara nasional target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) di Indonesia belum bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation Development) sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam sektor ekonomi pembangunan., yang menetapkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) untuk negara berkembang minimal harus 36% (tiga puluh enam persen) (Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

(APK PT) di Indonesia masih berada di

bawah target Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu diakui bahwa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) terus mengalami kenaikan meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Pada awal Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tahun 2015 target angka yang dapat dicapai sebesar 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada penghujung Renstra Kemenristekdikti pada tahun 2019 mengalami kenaikan hingga mencapai 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). Hal ini bukan berarti kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan tinggi membuat pemerintah cepat berpuas diri sehingga lupa melanjutkan *trend* angka kenaikan lebih signifikan lagi. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan tinggi merupakan pekerjaan

yang perlu di prioritaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Indonesia telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) sebagaimana data yang telah ditunjukan di atas apabila melihat keluar kemudian dibandingkan dengan negara lain Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Berikut merupakan gambar perbandingan Indonesia dengan negara lain dalam Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.

37.2

53

85

94.4

36

30.28

Gambar 1. Perbandingan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK PT) Indonesia dengan negara-negara lain pada tahun 2019.

Sumber : Laporan Kerja Kemenristekdikti, 2020.

Dalam gambar di atas jelas terlihat bahwa posisi Indonesia berada paling bawah dalam pencapaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) jika dibandingkan negara lain di mana Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi negara lain sudah berada di atas angka 70 % (tujuh puluh

persen). Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi Indonesia masih berada di bawah angka 40% (empat puluh persen). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi Indonesia masih tertinggal dengan angka capaian baru menyentuh 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2019. Angka pencapaian Indonesia masih di bawah negara lain seperti Malaysia dengan pencapaian 37,2% (tiga puluh tujuh koma dua persen), Filipina 36% (tiga puluh enam persen), Thailand 53% (lima puluh tiga persen). Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, dengan pencapaian angka partisipasi pendidikan tinggi mencapai 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen). Menurut Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) di Indonesia sangat jauh tertinggal hampir lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia yang hanya sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen).

Menurut paparan ketiga data

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pencapaian | Angka | Partisipasi | Kasar |
| Pendidikan | Tinggi | (APK PT) | yang |

dipaparkan di atas baik dari Kabupaten

Karanganyar maupun secara nasional kemudian di bandingkan dengan negara di Asia Tenggara jelas terlihat bahwa pencapaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan data tersebut jelas tertinggal bahwa kita masih tertinggal jauh berkenaan dengan kesadaran masyarakatnya untuk menempuh pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) di Kabupaten Karanganyar hanya menggambarkan partisipasi masyarakat masyarakat terhadap pendidikan tinggi secara umum dikarenakan secara garis besar pembahasan mengacu pada Kebijakan *Reward* Masuk PTN yang di mana substansi kebijakan terfokus terhadap peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi negeri. Untuk melihat bagaimana implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri maka perlu di dalami lebih jauh dalam penelitian.

Berlandaskan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi Negeri di Kabupaten Karanganyar” dikarenakan penelitian ini belum pernah dilakukan. Hasil penelitian

diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya terkait peningkatan akses pendidikan tinggi serta kebijakan pendanaan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.

Adapun hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi Diterima Seleksi Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Karanganyar. Asti Wara Ananjani (2011). Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah objek penelitian itu sendiri yaitu Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah bagaimana analisis impelementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di mana penelitian sebelumnya dengan menggunakan penelitian Dunn sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN menurut Edward III. Perbedaan selanjutnya adalah di mana penelitian sebelumnya hanya terfokus pada implementasi kebijakan semata akan tetapi untuk penelitian ini akan dikaitkan bagaimana implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi negeri.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan kepada para stake holder mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

# METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

# Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan Dusun Ploso, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan penelitian ini dimulai bulan Oktober 2021 s.d Januari 2022.

# Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala bidang PAUD dan DIKMAS dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karanganyar, orang tua kelas XII, dan siswa kelas XII.

# Prosedur

Menurut Sugiyono (2011:43) paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif yaitu: a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas

tentang informasi yang diperolehnya. b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

# Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara sedangkan untuk data sekunder dengan menggunakan data obervasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan instrument pedoman obervasi, wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obervasi yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung kemudian melakukan wawancara yang dilakukan mendalam dan semi- terstruktur terakhir ialah melakukan dokumentasi terhadap notulensi wawancara, foto pelaksanaan wawancara, dan transkrip hasil wawancara.

# Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dicetuskan oleh Miles dan Huberman ( 2014 : 10) yaitu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian kondensasi data dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, dan penyajian data yang di dalamnya melakukan analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan tentang implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar. Di samping itu juga akan dibahas tentang analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, dan juga akan dibahas tentang manfaat dan permasalahan Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

# Temuan penelitian

* 1. Implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partispasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar a) komunikasi : komunikasi yang efektif dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN ternyata berdampak baik terhadap partisipasi sasaran kebijakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi terutama pendidikan tinggi negeri melalui motivasi belajar yang bertambah serta dukungan positif dari orang tua yang merasa kebijakan ini berdampak baik terhadap kondisi psikis anak dan membantu pendanaan perkuliahan; b) sumber daya : adanya masalah sumber daya manusia dan sumber daya dana dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN terutama dari pemberian dana yang terbatas masih memberikan dampak positif terhadap semangat sasaran kebijakan untuk berpartisipasi melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi ninggi dikarenakan uang yang diberikan menjadi semangat tersendiri dan ada kepuasan tersendiri ketika memperolehnya bagi sasaran kebijakan; c) sikap: 3 narasumber memiliki keterkaitan satu sama lain di mana di dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi orang

tua, sasaran kebijakan, dan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan *Reward* Masuk PTN memberikan dampak positif kepada masyarakat serta dunia pendidikan; d) struktur birokrasi: peran pelaksana dalam merampingkan prosedur pengajuan dalam implementasi kebijakan *Reward* Masuk PTN sangat diperlukan agar rumitnya prosedur tidak mengurangi partisipasi dan perhatian masyarakat dalam kebijakan ini.

* 1. Dalam proses implementasinya ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sebagai berikut; a) faktor penghambat yaitu variabel dalam komunkasi adalah pesan yang disampaikan dalam web tidak bisa diakses semua kalangan terutama orang tua. Kemudian dalam variabel sumber daya mengenai jumlah dana yang terbatas memperlambat waktu pencairan, segi kuantitas sangatlah minim jumlah pelaksana kebijakan untuk verifikasi dan input berkas; b) faktor pendorong pada variabel pertama yaitu komunikasi efektif dengan sampainya pesan kepada sasaran kebijakan dan masyarakat sehingga akan bermanfaat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan kebijakan

ini kemudian variabel kedua sumberdaya dengan memiliki staf yang kompeten dalam pelaksanaan kebijakan yang diiringi penyebaran informasi dilakukan semasif mungkin melalui online dan media cetak selanjutnya ialah variabel ketiga yatitu sikap dengan sikap loyalitas para pelaksana kebijakan yang siap mengemban tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ini. Variabel terakhir struktur birokrasi dalam implementasi tidak adanya fragmentasion antar pelaksana kebijakan serta menjalankan implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sesuai SOP.

* 1. Dalam partisipasi pendidikan tentu aja beberapa informasi yang ditemui yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam masalah tersebut , kedua fakor tersebut ialah:
		1. Faktor pendorong sebagai berikut; a) Dari segi impelementasi kebijakan *Reward* masuk PTN berdampak baik terhadap psikis anak dalam partisipasi jenjang pendidikan tinggi terutama pendidikan tinggi negeri melalui motivasi belajar meningkat; b) Dari hasil temuan di lapangan yaitu dukungan orang tua yang besar kepada sang anak, adanya berbagai macam bentuk beasiswa dari pemerintah, dan

masyarakat sudah memiliki motivasi dan kesadaran tersendiri untuk menempuh pendidikan setinggi- tingginya.

* + 1. Faktor Penghambat dalam implementasi partisipasi pendidikan tinggi sebagai berikut; a) Dari implementasi kebijakan *Reward* masuk PTN yaitu proses pencairan dana terhalang oleh jumlah dana terbatas, pihak yang diajak bekerja sama dalam sosialisasi tidak konsisten menyampaikan informasi dan belum adanya pengukuran yang jelas mengenai ketercapaian tujuan kebijakan; b) perbedaan pandangan minat dan bakat yang membuat konflik antar orang tua dan anak yang berpengaruh pada dukungan satu sama lain dalam partisipasi pendidikan tinggi, perubahan orientasi di mana lebih memilih langsung ke dunia kerja setelah lulus sekolah menengah atas.

# Pembahasan

* 1. **Deskripsi lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 2 lokasi yang berbeda. Lokasi yang pertama adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Mojopahit, Komplek Perkantoran, Cangakan Karanganyar, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (diakses dari [https://disdikbud.karanganyarkab.go.id](https://disdikbud.karanganyarkab.go.id/)).

Gedung yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama dipergunakan sebagai ruang kerja para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan mushola. Lantai kedua pada bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dipergunakan sebagai ruangan besar yang berguna untuk rapat bagi pegawai dan tamu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dibantu oleh 96 PNS dan 12 Non PNS. Visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjadi fokus orientasi terhadap seluruh sistem dan kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya masyarakat yang cerdas, berbudi luhur, dan taqwa.

1. Misi
	1. Menyediakan ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan akses pendidikan.
	2. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.
	3. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
	4. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah. (diakses dari [https://disdikbud.karanganyarkab.go.id](https://disdikbud.karanganyarkab.go.id/) )

Lokasi kedua penelitian ini adalah Dusun Ploso, Kecamatan Mojogedang, Desa Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Dusun Ploso merupakan suatu dusun yang masih tergolong tradisional dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai para leluhur. Masyarakatnya memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dan sikap ramah tamah yang tinggi. Setiap terdapat kegiatan, masyarakat selalu melaksanakannya dengan cara gotong- royong . Fasilitas umum yang terdapat di Dusun Ploso antara lain masjid, lapangan voli, jalan dusun, dan makam. Masjid yang terdapat di Dusun Ploso Bernama Ummul Qura yang kondisinya terawat dengan sangat baik. Lapangan voli yang terdapat pada Dusun Ploso baru beberapa bulan diperbaiki setelah sebelumnya megalami kerusakan,letaknya pada sebelah barat dusun

dan berbatasan langsung dengan Dusun Gaden. Jalan yang terdapat di Dusun Ploso berupa jalan aspal untuk Sebagian area tetapi masih didominasi jalan cor. Area pemakaman terletak di bagian timur dusun (diakses dari

[http://opendata.karanganyarkab.go.id](http://opendata.karanganyarkab.go.id/) ).

# Deskripsi narasumber

Wawancara dilaksanakan terhadap 1 orang narasumber kunci yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan terhadap 2 orang narasumber di Dusun Ploso, Kecamatan Mojogedang, Desa Mojogedang, Kabupaten Karanganyar . Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama menggunakan inisial, yaitu AM, AI, dan UM.

Narasumber AM disini sebagai Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selaku pelaksana Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Selanjutnya AI sebagai pihak sasaran kebijakan dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN yang saat ini menjadi mahasiswi salah pendidikan tinggi negeri. Kemudian narasumber UM merupakan orang tua yang memiliki anak yang sedang menempuh sekolah menengah atas dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Narasumber AM tersebut dianggap bisa menggambarkan

proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di jajaran pemerintahan sedangkan narasumber AI bisa memberikan informasi mengenai kaitan implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dengan keputusan melanjutkan pendidikan tinggi negeri dan narasumber UM merupakan pihak yang diharapkan mampu memberikan informasi mengenai keputusan mereka untuk mendukung atau tidak sang anak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi negeri dengan adanya Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

Wawancara dengan narasumber dengan inisial AM dilaksanakan pada hari Kamis, Kamis, 11 November 2021. Narasumber dengan inisial AI dilaksanakan pada hari 15 Desember 2021. Narasumber dengan inisial UM dilaksanakan pada hari Selasa , 25 Januari 2022.

# Analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN oleh George C Edward III.

Pada bagian ini menjelaskan mengenai analisis implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dalam meningkatkan partispasi pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan model implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh George C Edward III. Berikut merupakan paparan hasil penelitian:

# Faktor-faktor Komunikasi

Analisis dimulai dari faktor komunikasi, implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah berjalan secara efektif. Proses komunikasi pertama adalah antar pelaksana kebijakan yakni aparat pemerintahan kabupaten, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui Kepala Dinas serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar . Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN ini adalah sebagai berikut

Gambar 5. Kerangka berpikir Komunikasi kedua terjadi antara

aparat pemerintah Kabupaten (dalam hal ini

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) dengan Sekolah, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar serta Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Proses komunikasi berpotensi mengalami kegagalan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat karena komunikasi yang bersifat satu arah, di mana aparat pelaksana kebijakan menyampaikan dan menerapkan kebijakan yang dibuatnya tanpa diiringi munculnya *feedback* dari masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

*Feedback* menunjukkan bagaimana persepsi dan penyikapan masyarakat terhadap perlakuan yang dia terima. Dengan demikian letak pentingnya menerima *feedback* dari masyarakat sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan konsep komunikasi bahwa, komunikasi bisa dikatakan efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas, melainkan juga dapat mempengaruhi dan dilaksanakan oleh komunikan.

Dari sisi t*ransmission* ’penyampaian’, pesan mengenai kebijakan disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah

aparat pelaksana kebijakan, dan pihak kedua adalah masyarakat yang akan dikenai kebijakan dalam hal ini siswa yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun siswa lulusan SMK/SMA dan orang tua. Pesan kepada masyarakat dalam hal ini kepada para anak yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun lulusan SMK/SMA dan orang tua yang menjadi objek penelitian pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas, pola penyampaian pesan yang dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi dengan bantuan berbagai media seperti *web*, meminta bantuan kepada kepala desa untuk menginformasikan pada masyarakatnya dan sekolah melalui surat edaran dan selebaran informasi yang disampaikan melalui *group whatsapp* dan papan informasi.

Sosialisasi pada dinas juga dilakukan melalui laman web seperti dikemukakan oleh narasumber AM sebagai berikut:

*Untuk sosialisasi sendiri kita bekerja sama dinas informasi dan komunikasi, Diskominfo Kabupaten Karanganyar selain itu juga ada di web disdikbud karanganyar.kemudian kita meminta bantuan kepada kepala desa disetiap desa untuk memberikan informasi ke masyarakat terus ke sekolah-sekolah seperti itu mbak*.

Dari proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang menjadi masalah dan keresahan masyarakat adalah penyampaian informasi pemerintah melalui media *web* di laman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Masyarakat menganggap informasi susah diakses terutama dari kalangan orang tua yang kurang memiliki pengetahuan teknologi dan informasi sehingga dengan penyampaian informasi yang kurang terakses oleh masyarakat secara luas mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber UM sebagai berikut :

*Tahu mbak kalau untuk kebijakan ini hibah dari pemerintah itu mengetahui dari anak saya juga bilang kalau kemarin itu mendapat perintah dari pak bupati ya jangan nominalnya tidak bisa saya sebutkan itu*.

Dari paparan narsumber di atas diketahui diperoleh informasi adanya kendala yang dihadapi para orang tua untuk mendapatkan informasi secara mandiri akan kebijakan ini akan tetapi objek penelitian masih memperoleh informasi mengenai kebijakan ini melalui sang anak. Jika dilihat maka jelas nampak adanya keterbatasan orang tua memperoleh informasi kebijakan

ini dari pihak terkait maka peran anak dalam hal ini anak yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun lulusan SMK/SMA di sini menjadi sangat krusial dalam keikutsertaan partisipasi masyarakat kebijakan ini. Anak pun dituntut untuk aktif mencari informasi baik disekolah maupun berbagai media sosial lainnya serta saling bertukar informasi dengan teman sebaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber AI sebagai berikut:

*Kalau infonya itu saya pernah dapet itu pas di grup kelas itu Mbak ada yang nge- share ini loh ada info kalau terima langsung aja ngajuin kayak gitu lahirnya pada rame- rame gitu ikut sama temen-temen terus saya tau ada informasi itu mbak*.

Dari pernyataan narasumber di atas bisa didapatkan informasi objek penelitian mendapatkan informasi kebijakan ini dari lingkungan sekolah dengan bertukar informasi dengan teman sebaya

Edward III mengatakan; *Lack of clarity in policy may not only inhibit intended change, it also may lead to substansial unanticipated change.* Tidak jelasnya pesan yang disampaikan bukan hanya mengakibatkan tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki. Sementara untuk penyampaian pesan dari

pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Kabupaten Karanganyar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah pelaksana kebijakan telah mendapat pesan secara jelas dari pembuat kebijakan. Kejelasan ini diperoleh melalui penjelasan berulang-ulang dalam koordinasi dan penyampaian kebijakan secara tertulis. Pelaksana kebijakan juga bisa mengajukan pertanyaan kepada pembuat kebijakan jika terdapat kekurangjelasan pesan.

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini kepada anak yang sedang menempuh pendidikan SMK/SMA maupun lulusan SMK/SMA dan orang tua, dari sisi *clarity* ’kejelasan’ sudah sangat cukup. Tetapi klaim jelas disini tidak bisa dimaknai bahwa pesan sudah disampaikan kepada semua masyarakat atau warga sekolah, dan tidak pula dimaknai bahwa pesan telah dipahami seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan kondisi sasaran kebijakan membawa akibat klaim *”clarity”* tidak bisa dipergunakan secara umum.

Kejelasan pesan yang dimaksud terbatas pada pihak-pihak objek penelitian yang mampu mengakses informasi secara baik dengan langsung maupun tidak langsung dan yang mau aktif dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Karena di antara pihak-

pihak yang terlibat seperti sekolah dan kepala desa terdapat tingkat pendidikan yang berbeda dan tingkat kesadaran yang berbeda pula, sehingga bisa dipastikan penerimaan pesan pihak-pihak sekolah dan masyarakat pun berbeda bahkan sampai tidak tahu pesan yang disampaikan.

Sementara dari sisi *consistance* ”konsisten”, pesan Kebijakan *Reward* Masuk PTN telah pula disampaikan secara konsisten baik pesan kepada pelaksana kebijakan maupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya kepada individu ataupun kelompok masyarakat dan sekolah diberikan pesan yang sama tanpa perubahan apapun. Pengetahuan yang diterima antara pihak kepala desa dan sekolah terhadap kebijakan (pesan) aparat Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menunjukan bahwa komunikasi saling bertukar pesan telah berjalan dengan baik. Namun timbul pertanyaan apakah pesan yang diterima pihak sekolah dan kepala desa diberikan kepada warga sekolah dan masyarakat sepenuh hati? Ternyata tidak semua kepala desa melaksanakanya. Masih ada beberapa sekolah yang kurang memberikan atensinya terhadap kebijakan ini.

Jika kegagalan pesan tersebut diasumsikan sebagai ketidakjelasan informasi kebijakan, penting artinya untuk menelaah dari sudut pandang Edward III mengemukakan *lack of clarity* ”ketidakjelasan” informasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain *complexity of policy* making ”kompleksitas pembuatan kebijakan publik”, *public opposition* ”penolakan masyarakat”, *competiting goals and the need for consensus* ”tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan, *Unfamiliarity of new policy* “sifat kebaruan kebijakan” , *avoiding accountability* ”kebijakan yang tidak akuntabel, dan sebagainya”. Mengacu pendapat Edward tersebut penyebab kegagalan ketidakjelasan informasi dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN adalah *complexity of policy making.*

Berdasarkan hasil temuan diwawancara dari 2 orang narasumber (orang tua dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN), bahwa dari segi komunikasi mengalami hambatan dengan masih sedikitnya media yang ada untuk memperoleh informasi terutama untuk para orang tua dari hasil wawancara dengan orang didapatkan informasi jika orang tua hanya mendapatkan informasi sebatas dari anaknya saja untuk informasi dari pihak lain seperti

pihak yang digandeng oleh pelaksana kebijakan seperti kepala desa tidak didapatkan padahal pihak ini diharapkan bisa memberikan pesan informasi kebijakan kepada masyarakat terkhususnya orang tua. Sedangkan bagi penerima dana informasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN melalui komunikasi antar teman sebaya dilingkungan sekolah yang menandakan adanya proses komunikasi di pihak yang digandeng pelaksana kebijakan yaitu sekolah . Hal ini dapat menimbulkan masalah di kalangan sasaran kebijakan di mana informasi akan sangat mungkin tidak bisa di dapatkan oleh semua pihak sasaran. Kemudian untuk hasil wawancara dengan 1 narasumber pelaksana kebijakan merasa komunikasi yang dilakukan cukup baik dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak dan melalui *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Dapat disimpulkan pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari dari segi komunikasi efektif walaupun ditemukan beberapa kekurangan di dalam implementasinya akan tetapi secara garis besar jika dilihat dari beberapa sisi seperti dari sisi *transmission* “penyampaian” jelas. Dari sisi *clarity* “kejelasan” sudah sangat cukup. Dari sisi *consistance* ”konsisten”, pesan Kebijakan *Reward* Masuk PTN telah pula disampaikan secara konsisten dalam

artian proses komunikasi dan pesan dari kebijakan ini diketahui oleh objek penelitian sehingga dapat dikatakan efektif.

# Faktor Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

# Staf

Pembahasan tentang staf diarahkan pada pembahasan kualitas dan jumlah pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Edward III mengatakan *We must evaluate the bureaucracy, not only in term of absolute numbers, but also in term of its capabilities to perform desired tasks.*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Edward III pembahasan mengenai staf tidak hanya membicarakan besaran saja. Karena keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan (kualitas) staf pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, Edward III menyarankan dua besaran pokok dalam menganalisa sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa *size* dan *skills.*

Pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Kabupaten Karanganyar lemah dari sisi sumber daya. Pegawai yang terlibat langsung dalam Kebijakan *Reward* Masuk PTN, yaitu Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarkat Kabupaten Karanganyar, hanya berjumlah 4 (empat) orang. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya dua orang yang dianggap sebagai pelaksana, dua diantaranya Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar serta kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang menjabat sebagai manajer Kebijakan *Reward* Masuk PTN jadi dalam hal ini kasi dan kepala dinas tidak dihitung sebagai pelaksana lapangan.

Sebenarnya menurut ketentuan dan SK yang ada staf pengelola dana *Reward* berjumlah empat orang, namun pada kenyataannya staf yang benar-benar sebagai pelaksana lapangan hanya berjumlah dua orang, jadi jika manajer Kebijakan *Reward* Masuk PTN tidak dihitung sebagai pelaksana lapangan, maka pihak yang terlibat didalam kepengurusan berkas *Reward* masuk PTN se Kabupaten Karanganyar hanya akan ditangani oleh dua orang saja. Dengan pertimbangan kekurangan tenaga pelaksana yang ada di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang tentu berkaitan dengan masalah kelancara implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN, selain itu manajer Kebijakan *Reward* Masuk PTN juga menangani masalah pengaduan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan bekerjasama dengan instansi yang terkait. empat orang tentu jumlah yang sangat tidak memadai dalam menangani Kebijakan *Reward* Masuk PTN terhadap semua berkas pengajuan dana di Kabupaten Karanganyar dikarenakan pemegang kendali teknis berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AM diperoleh informasi berikut

:

*Tim untuk proses input sendiri ada 2 orang pegawai yang juga memeriksa berkas apabila ada yang kurang akan dihubungi oleh pihak sini selanjutnya ada saya yang bertanggung jawab dalam proses yang terjadi teruss apalagi yaa…. Pak Kadin juga ikut.*

Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan, sub dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten karanganyar tidak memiliki keluhan yang cukup substansif. Dikarenakan koordinasi yang baik antara Bupati, Badan Keuangan Daerah, dan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, hal ini dibuktikan dengan adanya alur mekanisme pengajuan hingga pencairan yang jelas sesuai dengan tata peraturan yang berlaku mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Pendidikan Tinggi Negeri yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 .

*Even with substansial funds it is not easy to find properly skilled personel. This is especially true when a government agency is carrying out or regulating highly technical activities* (*Edward III, 1980*).

Kurangnya *size* bisa saja dilakukan proses *recruitment* agar semakin banyak pihak yang membantu untuk melakukan berbagai proses didalamnya pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN Namun hal tersebut kembali terbentur masalah dana. Penambahan jumlah petugas membutuhkan dana cukup besar apalagi direkrutnya petugas baru dengan keterlampilan tinggi memiliki konsekuensi pemberian gaji yang tinggi juga. Sementara seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dana *safeguarding* di tingkat dinas kabupaten tidak ada. Satu-

satunya cara mencapai perbaikan (kuantitas) *size* para pelaksana kebijakan baik di tingkat Kabupaten adalah kondisi saat ini (dengan mengharapkan) bantuan dari para masyarakat luar seperti anak yang magang di Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk membantu berbagai pekerjaan di Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Yang menjadi catatan penting adalah orang menjadi terampil tapi tanpa memiliki pemikiran terbuka untuk melakukan inovasi baru akan memperkecil peluang muncul inovasi baru dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

# Informasi

Informasi diberikan berdasarkan peraturan yang ada yaitu peraturan bupati mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Pendidikan Tinggi Negeri yang tertuang dalam peraturan bupati Nomor 52 Tahun 202 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Negeri.

Untuk media informasi yang digunakan ditingkat pemerintahan adalah melalui laman *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Sementara untuk tingkat sekolah melalui selebaran yang ditempel di papan informasi sekolah dan melalui komunikasi antar teman sebaya. Untuk sosialisasi masyarakat terutama melalui para kepala desa hingga saat ini belum diketahui dengan jelas bagaimana metode yang dilakukan. Menurut narasumber AM menuturkan bahwa :

*untuk sosialisasi sendiri kita bekerja sama dinas imformasi dan komunikasi,Diskominfo Kabupaten Karanganyar selain itu juga ada di web disdikbud karanganyar.kemudian kita meminta bantuan kepada kepala desa disetiap desa untuk memberikan informasi ke masyarakat terus ke sekolah-sekolah seperti kitu mbak*.

Salah satu indikator yang menunjukan ketersampaian informasi adalah dengan dimilikinya laman khusus di *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan selebaran informasi secara cetak, *web* tersebut bisa diakses kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat selain selebaran informasi cetak didistribusikan ke sekolah dan desa-desa diwilayah Kabupaten Karanganyar. Adanya

informasi di *web* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berpengaruh kepada kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet. Selebaran informasi cetak diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar setiap tahun telah didistribusikan ke seluruh Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karangayar serta desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Namun pada sub bab ini peneliti hanya menerangkan secara umum saja, karena di sub bab sebelumnya pada pembahasan komunikasi telah meliputi pembahasan mengenai informasi, supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan hal yang sama.

# Kewenangan

Kebijakan tidak akan bisa diterapkan jika tidak disertai pendelegasian kewenangan kepada pelaksana. Setiap tahap Kebijakan *Reward* Masuk PTN yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Bab V Pasal 6:

1. Pada tahap perencanaan, kewenangan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar.
2. Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa pihak yang diberi kewenangan berbeda.

Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan memberikan kewenangan terhadap Kepala Dinas serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar serta Badan Keuangan Daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yaitu Mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan, Dinas membuat daftar Penerima Penghargaan dilengkapi dengan data rekening bank penerima, Dinas mencairkan dana secara bertahap dengan mekanisme transfer ke rekening penerima penghargaan, Dinas mengajukan pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah, Dinas mengajukan permohonan kepada Direktur Bank perihal pemindahbukuan.

Selanjutnya mengenai tugas dan tanggung jawab dari Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar ialah menjadi tim verifikasi yang akan membuat daftar nominatif penerima penghargaan yang dituangkan dalam berita acara tim verifikasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada tahap pemantauan kewenangan berada di *Inspektorat* Kabupaten Karanganyar. Pada tahap evaluasi kewenangan berada di Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkhususnya Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan penjelasan di atas wewenang yang dimiliki oleh berbagai lembaga pelaksana kebijakan dapat kita lihat bahwa adanya kecocokan di antara wewenang dengan tugas yang diberikan kepada pihak yang ikut terlibat. Dalam implementasinya pendelegasian wewenang terhadap Lembaga tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dalam imlementasi nya tidak ditemukan keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kewenagan yang diberikan.

# Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Berdasarkan hasil wawancara ke Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan penerima dana Kebijakan *Reward* Masuk PTN informasi bahwa di dalam proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN penyediaan sarana

prasarana dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta penerima *Reward* masuk PTN. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sendiri dalam proses implementasi hanya membutuhkan sarana dan prasarana seperti laptop dan *printer* yang digunakan untuk proses input nama penerima dan rekening penerima dan sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui dana APBD Kabupaten Karanganyar. Sedangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penerima adalah buku tabungan untuk penyaluran dana serta ATM yang membantu mempermudah proses penarikan tunai uang Kebijakan *Reward* Masuk PTN.

Berdasarkan hasil temuan dari segi sumber daya hambatan yang terjadi dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN adalah sumber daya manusia dalam arti pejabat yang terlibat dalam proses verifikasi dan input ditingkat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang terbatas dari segi jumlah pegawai yang terlibat dan dari sumber daya (dana) masih terjadi kendala yaitu : jumlah dana yang terbatas membuat kouta yang penerima setiap sesinya dibatasi sehingga ketika jumlah pengajuan membludak terpaksa dialihkan ke

sesi selanjutnya sehingga memperlambat waktu pencairan.

# Faktor Sikap

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sikap dan presepsi implementator dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya, bisa terjadi ditataran tataran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Edward III menyebut gejala ini dengan julukan *“the dispositions of implementators*“ tindakan yang bisa menjadi indikasi terjadinya sikap dan tindakan yang negatif antara lain parokhialisme, keengganan, selektif terhadap aspek kebijakan yang menguntungkan dan melalaikan terhadap aspek kebijakan yang tidak “*congruent*” dengan kepentingan organisasi asalnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat juga dipengaruhi sifat pelaksana kebijakan dan sikap pasrah terhadap permasalahan yang terjadi.

Mengacu pada hal di atas tentang sikap para *policy maker* dan implementator dijajaran instansi pemerintahan, berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan sikap positif dan mendukung pemberian *Reward* kepada anak yang diterima di pendidikan tinggi negeri baik dari pemerintahan, masyarakat, dan sasaran program, secara

kualitas sumber daya manusia para implementator memiliki kesediaan untuk menerima Kebijakan *Reward* Masuk PTN dan kesiapan mengemban tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan kutipan wawancara yang mendukung yang dikemukakan narasumber UM sebagai berikut :

“…*Iya mbak ini sangat sangat sangat mendukung dan sangat bermanfaat sekali untuk menyelesaikan masalah yaitu tadi(pendanaan)*”

Dari paparan di atas menunjukan sikap positif dari orang tua yang anaknya berkuliah di pendidikan tinggi negeri dan mendapatkan dana *Reward* untuk meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kuliah seperti uang saku. Kemudian pendapat tersebut didukung oleh narasumber AI berikut merupakan kutipan wawancara nya:

*…karena kan dari awal tuh ada pandangan buat kuliah gitu ya Jadi mungkin adanya Reward itu nggak Nggak ngaruh cuman kayak buat motivasi lebih kita biar kalau keterima Wah dapet ini nih kayak lebih semangat gitu aja sih.*

Dari paparan di atas menunjukan bahwa pemberian *Reward* berdampak positif terhadap motivasi dan semangat belajar anak agar diterima di pendidikan tinggi negeri.

Dari paparan tersebut menujukan ada kebanggan sendiri ketika menerima dana dari Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Hal tersebut juga didukung pendapat narasumber AM, berikut merupakan kutipan wawancara :

*“…Lebih baik dilanjutkan kan ini berdampak positif terhadap animo masyarakat dan motivasi masyarakat untuk kuliah.”*

Dari paparan tersebut pihak penyelenggara kebijakan menginginkan kebijakan untuk terus dilanjutkan karena dampak positif terhadap animo pengajuan dana *Reward* dan motivasi masyarakat untuk kuliah. Dari paparan ketiga narasumber jelas menunjukan adanya sikap positif dan mendukung pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN baik dari penyelenggara kebijakan. Sasaran kebijakan, dan masyarakat umum.

Berkaitan dengan kesediaan Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar guna menyelenggarakan Kebijakan *Reward* Masuk PTN, temuan hasil penelitian menunjukkan, secara umum Kasi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan siap menerima dan mampu menjalankan Kebijakan *Reward* Masuk PTN sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, berikut merupakan kutipan wawancara yang berkaitan dengan naramsumber AM sebagai berikut :

*…dari tahun 2020 dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya dipegang PKK. Pemindahan lebih ke tupoksi aja sih mbak kan disini itu paud dan dikmas, dikmas kan pendidikan masyarakat jadi Reward ini lebih masuk kalau pendidikan masyarakat sesuai dengan ranah kerja mbak..*

Menurut Thoha *(1992)* berpendapat bahwa penyebab atau hambatan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan ada tiga macam yakni: 1) hambatan internal, hambatan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, atau kultur dan budaya (*socio- cultural constraineds*); 2) hambatan eksternal, birokrasi/pemerintah; 3) tingkat kesadaran yang masih rendah (pendidikan rendah atau kurang informasi).

Mengacu kepada pendapat di atas, dikaitkan dengan implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menunjukan adanya *trend* positif dari masyarakat terutama lulusan SMA/SMK dalam pengajuan dana *Reward* masuk PTN, hal tersebut menunjukan semakin naik pula

trend positif anak yang melanjutkan pendidikan tinggi di pendidikan tinggi negeri. Hal ini disebabkan naiknya motivasi dan semangat anak belajar untuk mendapatkan pendidikan tinggi negeri favorit. Hal ini juga sejalan dengan dukungan orang tua siswa terhadap Kebijakan *Reward* Masuk PTN bahwa diadanya Kebijakan *Reward* Masuk PTN dapat meningkatkan semangat belajar dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak ketika kuliah. Sehingga hal ini berdampak positif terhadap kenaikan animo melanjutkan pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Karanganyar.

Secara umum sikap orang tua sangat mendukung implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sesuai dengan ketentuan yang ada, mengenai pemberian *Reward* yang hanya dilakukan satu kali bukan menjadi masalah yang berarti karena pada dasarnya orang tua sudah siap dengan kosekuensi masalah pendanaan yang akan dihadapi dalam proses perkuliahan. Selain itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus berupaya menjelaskan kepada siswa lulusan SMA/SMK untuk lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Tinggi Negeri dengan cara menyampaikan informasi mengenai Kebijakan *Reward*

Masuk PTN secara berulang dan bertahap melalui berbagai pihak yang terlibat dalam sosialisasi.

Ketiga ialah sikap, seperti yang kita lihat dalam proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari 3 pihak yang terlibat dalam proses implementasi yakni pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pihak luar menunjukan adanya sikap dan respons yang positif terhadap implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN. Pihak satu dengan lainnya saling mendukung untuk keberlangsungan kebijakan ini kedepannya.

# Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edwrads III, salah satu bab penting yang harus diperhatikan dalam membicarakan strutur organisasi dalam implementasi kebijakan publik ialah *Standard Operating Procedures* ( SOP ) dan *Fragmentation.* Meskipun dua hal tersebut penting banyak hal lain yang harus diberikan perhatian pula. Secara resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Dan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar memegang kendali SOP (*Standard Operating Procedures*) implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar No.52 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi

Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Pendidikan Tinggi Negeri. Di dalam pelaksanaan nya Pemerintah Daerah yang di dalamnya ada beberapa pihak yang terkait seperti Bupati, Badan Keuangan Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bersinergi dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Di sisi lain walaupun dengan adanya SOP dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan, SOP juga memiliki manfaat tersendiri. Organisasi yang menggunakan prosedur perencanaan yang fleksibel akan memiliki kendali yang baik terhadap kebijakan-kebijakan yang fleksibel pula. Hal ini sangat meumungkinkan bisa terjadi adaptasi yang cepat terhadap tanggung jawab yang baru daripada organisasi yang bertolak belakang dengan ciri di atas. Intensitas kecenderungan pelaksana dalam proses implementasi akan mempengaruhi hasil suatu kebijakan. Apabila hal semacam ini terjadi maka akan terjadi banyak perdebatan pada proses implementasi yang tersebut bisa membuat para bawahan akan menolak sepenuhnya untuk berperan dalam kebijakan tersebut. Selain itu perilaku yang kurang amanah bisa dimanfaatkan para pelaksana untuk mengelak dari tanggung jawabnya

secara diam-diam. Dalam menghadapi situasi seperti ini mentikberatkan agar pihak yang terlibat agar melihat peran pengawasan ddan pelaksanaan implemntasi untuk mengetahui berbagai macam perbedaan efektivitas implementasi kebijakan.

Terkait dengan konsep *fragmentation* yang dikemukakan oleh Edwards III, dapat dilihat bahwasanya implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN tidak mengalami *fragmentation.* Dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN tidak terjadi pemecahan koordinasi implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dan pemecahan pertanggungjawaban kebijakan. Walaupun pada praktiknya di lapangan menunjukan banyak pihak yang ikut terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Pihak-pihak selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakarat Kabupaten Karanganyar, yang terlibat dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN melakukan tugasnya

atas permintaan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa *fragmentation* bukan menjadi faktor penghambat dalam Kebijakan *Reward* Masuk PTN di Kabupaten Karanganyar. Hingga saat ini belum pernah terjadi miskoordinasi dan pertanggungjawaban berbagai pihak terlibat dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan baik, apabila dalam satu faktor terjadi *fragmentation* maka hal tersebut harus diberikan perhatian khusus. Selain menganalisa *fragmentation*, dapat ditemukan karakteristik birokrat pada suatu organisasi pelaksana kebijakan yang perlu diiperhatikan secara seksama. Salah satu karakteristik birokrat tersebut berhubungan dengan perilakunya.

Secara internal *fragmentasi* di dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara kebijakan dapat ditekan, akan tetapi *fragmentasi* dengan *stakeholder* kebijakan dengan masyarakat terjadi karena kepala desa sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab mensosialisasikan kebijakan yang tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga informasi tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mengenai keterlibatan pihak yang

bertanggung jawab dalam pengawasan dan *monitoring* atau dengan kata lain *fragmentasi* dalam hal pengawasan pada pemerintah daerah melakukan *monitoring* dan evaluasi *fragmentasi* birokrasi secara internal dan eksternal. *Monitoring* dan evaluasi internal dilakukan Sub Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. *Monitoring* dan evaluasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan proses implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN kedepannya akan berjalan semakin baik dikarenakan diketahui berbagai berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dari hambatan dan permasalahan yang terjadi. Sementara itu, *monitoring* dan evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga pengawas yang berkompeten diluar pengelola kebijakan antara lain; Inspektorat Jenderal Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Monitoring* dan evaluasi ekternal dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan program.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, untuk struktur birokrasi di instansi pemerintah tidak mengalami hambatan sementara itu struktur birokrasi dari

pemeritahan daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan *Reward* Masuk PTN mengalami hambatan dalam memperoleh informasi dari *web* dan sosialisasi dari kepala desa tidak dilakukan secara maksimal akan tetapi pihak lain seperti sekolah sudah menjalankan fungsi dengan baik dalam mensosialisasikan kebijakan kepada sasaran kebijakan sehingga pemerolehan informasi sasaran kebijakan cukup. Sehingga dapat disimpulkan impementasi Kebijakan *Reward* Masuk PTN dari segi struktur birokrasi efektif.

# SIMPULAN DAN SARAN

**Simpulan**

Diperlukan optimalisasi untuk faktor internal terutama komunikasi, dengan melaksanakan sosialisasi secara konsisten; Faktor sumber daya, dengan menambah pejabat pelaksana yang ada, faktor sikap pelaksana dan struktur birokrasi perlu dibangun kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

# Saran

Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi kemudian hari agar semakin banyak penelitian-penelitian mengenai kebijakan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

# Daftar Pustaka

1. **Dari buku teks:**

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana,

J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Thoha, M. (1992). *Perilaku organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.

Edward III, G. C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

# Dari skripsi/tesis/desertasi

Ananjani, A. W. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi Diterima Seleksi Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) Di Kabupaten Karanganyar.* Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas negeri sebelas maret.

# Dari jurnal

Muhardi, M. (2004). Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Mimbar: *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), 478-492.

# Dari internet

Indah Septiyaning Wardani. “*Reward Masuk PTN di Karanganyar Berlanjut, Anda Sudah Terdaftar?`*. Diakses tanggal 20 Maret 2022 dari [https://www.solopos.com/*Reward*-](https://www.solopos.com/reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google_vignette) [masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-](https://www.solopos.com/reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google_vignette) [anda-sudah-terdaftar-](https://www.solopos.com/reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google_vignette) [1279254#google\_vignette](https://www.solopos.com/reward-masuk-ptn-di-karanganyar-berlanjut-anda-sudah-terdaftar-1279254#google_vignette).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan . (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi 2020*.

Diakses tanggal 20 September 2021 dari [https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/dat](https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202019.pdf) [a/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20](https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202019.pdf) [Tinggi%20Indonesia%202019.pdf](https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202019.pdf)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020 – 2024*. Diakes

tanggal 20 September 2021 dari [https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf) [content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf) [2020-2024-rev-3.1.pdf](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024*. Diakses tanggal 20

September 2021 dari [https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf) [content/uploads/2020/10/RENSTRA-](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf) [KEMENDIKBUD-full-version.pdf](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2017*. Diakses tanggal 20 September 2021 dari [https://www.brin.go.id/wp-](https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LAPORAN-KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-2017.pdf) [content/uploads/2018/08/LAPORAN-](https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LAPORAN-KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-2017.pdf) [KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-](https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LAPORAN-KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-2017.pdf)

[2017.pdf](https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LAPORAN-KINERJA-KEMENRISTEKDIKTI-2017.pdf)